

Implementasi Program pada Satuan Pendidikan Non Formal Kota Padang Panjang (Implementation Programs In Non Formal Education Units Studio and Learning Activities Padang Panjang)

Suci Alfioni^{1*}, Febri Yuliani²

Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru^{1,2}

Sucialfioni998@gmail.com^{1*}, febriyuliani.fisipunri@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 24 November 2021

Revisi 1 pada 26 November 2021

Revisi 2 pada 2 Januari 2022

Revisi 3 pada 16 Februari 2022

Revisi 4 pada 14 Maret 2022

Disetujui pada 15 Maret 2022

Abstract

Purpose: Based on the background and a number of problem formulations above, the goal that the researcher wants to achieve is to know the implementation of the Non-Formal Education Program in the Padang Panjang City Non-Formal Education Unit and to know the challenges of implementation.

Research methodology: This type of research uses a descriptive study with a qualitative approach.

Results: This program has been running well, this is evidenced by the many changes that occurred after the learning activity studio was made an Education Unit, such as changes in terms of better facilities and infrastructure and changes in terms of better education, only in terms of human resources which are still not optimal.

Limitations: This study examines the Implementation of Non-Formal Education Programs in Non-Formal Education Units in Padang Panjang City, in this case the researcher uses the theory of Policy Implementation which consists of several components proposed by George C. Edward III in 2010.

Contribution: The existence of this research is able to be useful as input and improvement material for the authorities and related parties in this case to deal with the poor in Indonesia, enriching the reference literature in the Faculty of Social and Political Sciences, especially the Public Administration Science Study Program, and being able to act as a reference for researchers. future who want to raise a similar discussion.

Keywords: Implementation of Education, SKB.

How to Cite: Alfioni, S., Yuliani, F. (2022). Implementasi Program Pada Satuan Pendidikan Non Formal Kota Padang Panjang. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 85-95.

1. Pendahuluan

Program Non-Formal yang berjalan sampai saat ini di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang adalah PAUD, Program Paket A,B,C, Keterampilan (sewaktu-waktu dikarenakan covid19) dan Desain Grafis. Program Pendidikan Non-Formal yang dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar sekarang ini telah maju sekali mulai dari sisi fasilitas serta mutu sekolah dari sebelumnya saat masih menjadi unit pelaksana teknis dinas, sekarang sanggar kegiatan belajar sudah layaknya seperti sekolah pada umumnya. Dahulunya keterampilan di sanggar kegiatan belajar sangat di minati masyarakat tetapi semenjak covid-19 program tersebut hanya sesekali saja diadakan misalnya disaat hari-hari besar di Kota Padang Panjang.

Operasional dari Sanggar Kegiatan Belajar saat ini ada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang. Anak-anak yang putus sekolah atau memiliki keterampilan khusus bisa mendapatkan konseling di Pusat Kegiatan Belajar Sanggar Kegiatan Belajar. Program Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar paket A dan B di Kota Padang Panjang ini akan berlangsung Senin hingga Rabu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Kursus Paket C setelah pukul 12.00-16.00 WIB sore. Pada Kamis serta Jumat, siswa

mengikuti aktivitas ekstrakurikuler, berbagai seni dan keterampilan. Berikut beberapa data untuk lulusan SKB 4 tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Lulusan Sanggar Kegiatan Belajar 4 Tahun Terakhir

No	Program SKB	Lulusan tahun 2018	Lulusan tahun 2019	Lulusan tahun 2020	Lulusan tahun 2021
1.	Paket A	4	13	11	1
2.	Paket B	4	3	5	14
3.	Paket C	5	4	4	9
Total jumlah kelulusan		13	20	20	24

Sumber: data dari Sanggar Kegiatan Belajar

Dari data diatas dapat dilihat jumlah kelulusan dari tahun ke tahun naik, pada tahun 2018 yang lulus berjumlah 13 orang, pada tahun 2019 yang lulus berjumlah 20 orang, pada tahun 2020 yang lulus berjumlah 20 orang dan pada tahun 2021 lulus berjumlah 24, total keseluruhan yang lulus sampai pada saat ini 77 orang. Sedangkan data tutor atau pengajar yang mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar berjumlah 14 orang rata-rata sudah lulusan S1. Adapun jumlah dari data penduduk yang didapat dari kota Padang Panjang berjumlah 57.588 orang dengan persentase usia belajar secara keseluruhan adalah 4.339.

Program Non-Formal untuk keterampilan sendiri sebelum adanya covid-19 banyak yang melanjutkan keterampilan mereka sebagai mata pencaharian. Salah satu lulusan program ini pada tahun 2017 yang bernama neta sudah berhasil menjadi seorang wirausaha dengan produk kerajinan berupa tas rajut. Di sanggar kegiatan belajar ia memilih mengikuti pelatihan merajut sehingga saat ini sudah menjalankan usaha sendiri dengan penghasilan mencapai Rp2 juta dalam satu minggu. Sanggar kegiatan belajar di Padang Panjang saat ini juga memiliki usaha bersama berupa pengolahan jahe yang sudah berlangsung sejak 2015 sampai sekarang. Progres dari usaha tersebut sangat berkembang pesat dan omset yang masuk pun lumayan besar. Ini menjadikan masyarakat aktif untuk berwirausaha dan kreatif dalam berinovasi. Ada berbagai macam olahan jahe yang dibuat seperti: sirup jahe, serbuk jahe merah dan serbuk jahe putih. Visi dan misi merupakan sesuatu dasar yang penting sebagai penggerak kegiatan organisasi, sebab visi dan misi dapat mencerminkan tujuan singkat yang tertulis dengan jelas di sebuah organisasi ([Cakranegara, P. A. 2020](#)).

Bukti bahwa pendidikan non-formal di padang panjang selalu ingin belajar adalah pada tahun 2019 Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang mengunjungi PT Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta. Kedatangan rombongan dari Padang Panjang ini dalam rangka study komparatif ke Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Kepala UPT Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta memaparkan program kerja dari Sanggar Kegiatan Belajar. Dan juga program-program unggulan dari Sanggar Kegiatan Belajar sendiri. Setelah sesi diskusi, rombongan diajak berkeliling untuk melihat ruang keterampilan dan juga ruang kelas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta. Semenjak Program Non-formal Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan non-formal banyak perubahan yang terjadi seperti fasilitas saran dan prasarana untuk sekolah sudah dilengkapi oleh pemerintah dan dari segi anggaran pemerintah memberikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Sanggar Kegiatan Belajar.

Dalam proses berjalannya Program Non-Formal masih belum optimalnya Sumber Daya Manusia atau tenaga pengajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Saat ini tenaga pengajar yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar berjumlah 14 orang termasuk tenaga pekerja honorer, dengan jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk jumlah siswa di Sanggar Kegiatan Belajar. Salah satu faktor penyebab kurang optimalnya sumber daya manusia adalah kurangnya sosialisasi antara Program Non-Formal Sanggar

Kegiatan Belajar dengan masyarakat dan calon tenaga pengajar mengenai Program Non-Formal sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui program tersebut. Oleh karena itu lamaran yang masuk ke Sanggar Kegiatan Belajar sangat sedikit.

Program Non-Formal di Kota Padang Panjang selalu ingin melakukan perubahan di setiap tahunnya tetapi karena kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan non formal banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan mengerti program tersebut. Hanya segelintir orang yang mengerti dan paham akan program ini dan ikut bergabung dalam sanggar kegiatan belajar. Penulis tertarik melihat penerapan Program Pendidikan Non Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang apakah sudah mencapai tujuan dari program tersebut. Kurang lebih sudah 5 tahun peraturan ini dilaksanakan. Melalui alasan itu peneliti berminat dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang”. Penelitian ini akan berdampak pada keberlanjutan pelaksanaan program ini kedepannya, mengingat bahwa banyak kalangan yang tidak bisa melanjutkan studi secara formal.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

[Lajas & Macario \(2020\)](#) mengatakan bahwa kerangka kebijakan publik diusulkan, dengan mempertimbangkan instrumen kebijakan, sekelompok indikatif pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. [Kaplan \(2014\)](#) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah dan juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat umum [Indiahono \(2017:17\)](#).

Secara sederhana [Nugroho \(2012:123\)](#) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa transisi menuju masyarakat yang dicita-citakan. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan karena pada tahap ini lah kebijakan di terapkan pada publik. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan. Menurut Gordon dalam [Mulyadi \(2016:24\)](#) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Wahab dalam [Anggara \(2012:530\)](#) pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan publik, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Menurut [Wahab \(1997:63\)](#) implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu maupun pejabat atau kelompok swasta atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dalam studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya 2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan pendekatan *top down*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan *bottom up*).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam [Mulyadi \(2016:57\)](#) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut [Sujianto \(2008:55\)](#) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, tidak hanya hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksana kebijakan, tetapi yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program yang dilaksanakan melalui komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.
2. Sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia/pelaksana, dukungan fasilitas, serta sumberdaya wewenang.
3. Disposisi, merupakan suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau memotivasi para pelaksana untuk melaksanakan suatu program.

Manfaat kebijakan, suatu kebijakan atau program yang dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek dan berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran. Semakin besar dirasakan manfaat kebijakan oleh kelompok sasaran, maka semakin besar dukungannya terhadap program. Marilee S. Grindle dalam [Kasmad \(2013: 50-54\)](#) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah “*content*” dan “*context*” dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini untuk dapat menghindari kesamaan dalam penulisan, oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. [Putri Indraningrum \(2015\)](#), Ditemukan fakta bahwa Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunung kidul dilatarbelakangi kebutuhan dana, SDM, serta fasilitas guna memaksimalkan program yang dilaksanakan, kebutuhan lembaga dalam mempertahankan kualitas program, dan menyalurkan lulusan program kecakapan hidup.
2. [Trisnawati, E., Iskandar, I., & Gamar, M. M. \(2020\)](#), Ditemukan fakta bahwa Permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimanakah upaya Lembaga SPNF SKB Mapande menangani siswa putus sekolah. Rintangan apa yang Lembaga SPNF SKB Mapande hadapi dalam menangani siswa putus sekolah.
3. [Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo, Yatim Riyanto \(2020\)](#), Perencanaan manajemen dalam akreditasi di Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Malang diselenggarakan melalui penyusunan RKT dan RENSTRA yang disusun oleh seluruh pengurus SKB Kota Malang dan komite SKB Kota Malang. Proses perencanaan manajemen dalam akreditasi di SKB Kota Malang berfokus pada persiapan untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya akan dibutuhkan pada saat akreditasi yang berasal dari pengembangan dari hasil evaluasi program kerja periode sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan NonFormal belum banyaknya pengoptimalan dalam segi SDM maupun Program-Program dari Pendidikan NonFormal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari masyarakat supaya turut berkontribusi untuk mendukung program yang sudah dicanangkan pemerintah.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Pendidikan Non-Formal yang diwadahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Teknik untuk mengumpulkan data termasuk tahapan yang sangat strategis, sebab pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data Bogdan & Taylor dalam [Moeloeng \(2007:4\)](#) yakni field research, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data Hubberman dan Miles (1992) dalam [Idrus \(2009: 147-148\)](#) yakni reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana berdasarkan atas kebutuhan data oleh penulis, Adapun informan penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
2. Kepala Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang.
3. Guru di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang.
4. Siswa/siswi di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang.

4. Hasil dan pembahasan

Sanggar Kegiatan Belajar di kota Padang Panjang sudah ada semenjak tahun 2013 sebagai unit pelaksana teknis dinas. Melalui hasil survei dilapangan, Program Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang berjalan lancar layaknya seperti sekolah pada umumnya. Setiap hari kegiatan disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan di yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk sementara ini terpaksa dihentikan terlebih dahulu karena wabah covid, hanya jika adas acara atau peringatan hari-hari besar mereka melakukannya kembali. Sejak diadakannya keterampilan pada Program Pendidikan Non-Formal banyak masyarakat yang terbantu dan banyak juga masyarakat yang menjadikan keterampilan tersebut menjadi sumber mata pencaharian.

Dengan demikian, hasil observasi yang terlihat peneliti dilapangan bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Apalagi menjadi Satuan Pendidikan Non-Formal banyak perubahan yang terjadi, yang sangat terlihat yaitu dari segi sarana dan prasarana yang sudah memadai dari sebelumnya. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di temukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang sebelumnya bahwa masih belum optimalnya Sumber Daya Manusia/ tenaga pengajar disana, tenaga pengajar yang ada saat ini berjumlah 14 orang termasuk honorer itu masih belum cukup untuk mengajar sekian banyak murid di Sanggar Kegiatan Belajar. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Sanggar Kegiatan Belajar yang menjadi wadah untuk Program Pendidikan Non-Formal adalah kurangnya sosialisasi mengenai peluang untuk tenaga pengajar baru oleh Sanggar Kegiatan Belajar kepada masyarakat/ calon tenaga pengajar baru, banyak yang tidak mengetahui Program Pendidikan Non-Formal tersebut. Oleh karena itu lamaran yang masuk ke Sanggar Kegiatan Belajar sangat sedikit.

Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang terdiri beberapa komponen dikemukakan oleh George C. Edward III tahun 2010 dalam [Putra, R. H., & Khaidir, A. \(2019\)](#), teori menyatakan pada intinya mengandung tujuan yang sama bahwa kerangka Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar paling tidak harus mencakup 5 komponen-komponen utama dalam mewujudkan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi dan
4. Struktur Birokrasi

Untuk itu dapat membahas 5 komponen utama Implementasi diatas yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang, penulis melaksanakan penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa program Pendidikan Non-Formal yang diwadhahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan kegiatan pelatihan atau desain grafis pesertanya langsung dari masyarakat itu sendiri, masyarakat dijadikan sebagai objek dalam kegiatan tersebut. Program yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar sudah terlebih dahulu di setujui oleh Pemerintah Daerah

kemudian baru dilaksanakan. Program tersebut terlebih dahulu di susun di Dinas Pendidikan bersama dengan orang keuangan di daerah tersebut.

Untuk program keterampilan sendiri sebelum adanya covid-19 banyak yang melanjutkan keterampilan mereka sebagai mata pencaharian. Salah satu lulusan Sanggar Kegiatan Belajar tahun 2017 yang bernama Neta sudah berhasil menjadi seorang wirausaha dengan produk kerajinan berupa tas rajut. Di sanggar kegiatan belajar ia memilih mengikuti pelatihan merajut sehingga saat ini sudah menjalankan usaha sendiri dengan penghasilan mencapai 2 juta dalam satu minggu. Program Pendidikan Non-Formal Sanggar kegiatan belajar di Padang Panjang saat ini juga memiliki usaha bersama berupa pengolahan jahe yang sudah berlangsung sejak 2015 sampai sekarang. Progres dari usaha tersebut sangat berkembang pesat dan omset yang masuk pun lumayan besar. Ini menjadikan masyarakat aktif untuk berwirausaha dan kreatif dalam berinovasi. Ada berbagai macam olahan jahe yang dibuat seperti: sirup jahe, serbuk jahe merah dan serbuk jahe putih.

Terdapat kegiatan ekstrakurikuler dari Program Pendidikan Non-formal yang biasanya selalu dibuka kelas rutin untuk kerajinan bagi masyarakat setempat, sudah banyak juga masyarakat padang panjang yang sudah menjadikan kerajinan tersebut sebagai sumber mata pencaharian tetapi semenjak covid kegiatan ditiadakan terlebih dahulu karena dana yang ada lebih diutamakan untuk pendidikan Paket A-C. tetapi jika pemerintah daerah mengadakan event seperti berbentuk kerajinan atau memasak masyarakat yang biasa mengikuti kelas diikutsertakan dalam event tersebut.

Program Pendidikan Non-Formal memiliki beberapa keterampilan yang memang harus bekerja sama dengan beberapa lembaga mitra kerja agar dapat membantu penyelenggaraan program keterampilan tersebut, lembaga terkait dalam menjalankan kegiatan keterampilan di lebih banyak dibidang kerajinan seperti Sosialisasi kerajinan bordir, memasak, kerajinan tas rajut dan lain-lain. Salah satu Sanggar mitra kerja yang diundang untuk menyelenggarakan kegiatan kerajinan di Sanggar Kegiatan Belajar dari Senja Kenanga untuk menjadi narasumber.

Program Pendidikan Non-Formal berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang oleh karena itu harus selalu ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan Sanggar Kegiatan Belajar. Pemerintah Daerah harus selalu tau perkembangan yang ada di Program Pendidikan Non-Formal. Semenjak adanya peraturan [perwako no 16 tahun 2017](#) mengenai Program Pendidikan Non-Formal, pemerintah lebih memperhatikan perkembangan Program Pendidikan Non-Formal dari sebelumnya ([Maulina, V. 2020](#)).

Program Pendidikan Non-Formal dalam menjalankan sebuah program tentu butuh yang namanya komunikasi yang baik demi terwujudnya visi dan misi dari program tersebut. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dari Sanggar Kegiatan Belajar dengan Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar beberapa tahun kebelakang. Maksud dari berjalan lancar disini adalah pemerintah selalu merespon tentang keluhan-keluhan yang ada dan pemerintah daerah berusaha mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang juga selalu memperhatikan apa saja yang masih belum memadai dan berusaha memenuhi hal tersebut agar visi dan misi Program Pendidikan Non-Formal dapat tercapai dari segi sarana prasarana.

Siswa merasa bahwa guru-guru yang mengajarkan mereka di Sanggar Kegiatan Belajar sangat menerima mereka dengan baik disana. Guru yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar juga sangat ramah kepada siswa-siswinya, jika ada siswa yang tidak mengerti dalam belajar, guru mereka sangat bersedia untuk menjelaskan kembali sampai siswa mengerti.

Dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Non-Formal di Kota Padang Panjang sama seperti sekolah pada umumnya juga memiliki jadwal disetiap harinya. Tetapi untuk jadwal disesuaikan dengan jumlah guru yang ada maka dari itu beberapa jadwal ada yang terpisah dan juga terkendala ruangan kelas yang belum memadai untuk dilaksanakannya kegiatan belajar secara serentak dari paker A-C. Untuk paket

A dan B dilaksanakan pada Senin-Rabu pukul 08.00-12.00 WIB. Siang hari pukul 12.00-16.00 WIB dilanjutkan kelas untuk paket C.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari awal terbentuknya program pendidikan non-formal yang diwadahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar mereka sudah memiliki tenaga kerja atau pegawai yang sudah berkompeten dibidangnya dan sampai sekarang tenaga pekerja atau pegawai di Sanggar Kegiatan Belajar berjumlah 14 orang. Tenaga kerja atau pegawai di Sanggar Kegiatan Belajar memiliki strata pendidikan yang rata-rata sudah S1, belum adanya penambahan tenaga pekerja atau pegawai di karenakan belum ada nya yang mendaftar di Sanggar Kegiatan Belajar.

Menurut [Fitrianingrum, N. S., Aminin, S., & Riyanto, R. \(2022\)](#) Guru dalam melaksanakan tugas seolah hanya sebagai suatu formalitas atau kegiatan rutin dan terkesan kurang kreatif. Pembelajaran yang diselesaikan oleh pengajar sebenarnya pada umumnya masih bersifat konvensional, hanya menyampaikan materi sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum yang ada di dalam buku panduan. Besar harapan program pendidikan non-formal yang diwadahi Sanggar Kegiatan Belajar kedepan bisa merekrut pegawai baru untuk mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Semakin banyak tenaga pengajar tentunya semakin memudahkan proses berjalannya program pendidikan non-formal. Dengan adanya penambahan tenaga pengajar maka diharapkan program pendidikan non-formal dapat mencapai visi misinya. Sumber Daya Manusia di Sanggar Kegiatan Belajar masih belum optimal untuk menjalankan program pendidikan non-formal di sanggar kegiatan belajar. Dengan jumlah tenaga kerja yang sekarang hanya cukup untuk mengajar dengan jumlah siswa yang sekarang, tetapi pemenuhan sumber daya manusia untuk kedepannya tentu masih kurang, Sanggar Kegiatan Belajar sangat mengharapkan adanya tambahan sumber daya manusia untuk kedepannya.

Tetapi masih belum optimalnya sumber daya manusia atau tenaga pengajar disana, tenaga pengajar yang ada saat ini berjumlah 14 orang termasuk honorer itu masih belum cukup untuk mengajar sekian banyak murid di Sanggar Kegiatan Belajar. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi mengenai Sanggar Kegiatan Belajar sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui program tersebut. Oleh karena itu sangat kurang tenaga pengajar yang mendaftar di Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Padang Panjang selalu ingin melakukan perubahan setiap tahunnya tetapi karena kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan non formal banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan mengerti program tersebut. Hanya segelintir orang yang mengerti dan paham akan program ini dan ikut bergabung dalam sanggar kegiatan belajar.

Sumber daya financial Sanggar Kegiatan Belajar berasal dari Pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Berdasarkan dalam penelitian [Maulina, V. \(2020\)](#) Semenjak dikeluarkannya [Perwako No 16 tahun 2017](#) dalam peraturan tersebut sudah terdapat berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Sanggar Kegiatan Belajar. Mengenai Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal tentunya Sanggar Kegiatan Belajar mendapatkan dana dari Pemeritah Daerah Kota Padang Panjang. Dalam hal ini pemehuan sarana dan prasarana untuk Kegiatan Program Sanggar Kegiatan Belajar. Tetapi sampai sekarang masih ada beberapa peralatan yangSX belum tercukupi.

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sudah mencanangkan anggaran untuk Program Pendidikan Non-Formal yang diwadahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Anggaran Sanggar Kegiatan Belajar tersebut selama ini sudah memadai dan mendukung pelaksanaan program kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan perwako nomor 16 tahun 2017 ([Maulina, V. 2020](#)). Selama ini semua kegiatan yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar semenjak sudah menjadi Satuan Pendidikan semua dana ditanggung oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sudah cukup dalam pemenuhan sarana dan prasarana di Sanggar Kegiatan Belajar. Fasilitas yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar sekarang sudah mencukupi untuk sebuah sekolah. Hanya saja butuh penyempurnaan dari semuanya, tentunya juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam penyempurnaan tersebut.

Sanggar Kegiatan Belajar memiliki satu ruangan yang memang dikhususkan untuk kegiatan kerajinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang sebenarnya sudah cukup memadai seperti sarana prasarana dalam bentuk bangunan atau peralatan yang diperlukan dalam hal mengajar. Saran dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat berguna dan dibutuhkan oleh siswa dan siswi yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar. Ruangan lain juga sudah memadai untuk proses belajar siswa dan siswi di Sanggar Kegiatan Belajar sudah terdapat berbagai fasilitas untuk dikelas tersebut seperti papan tulis, meja, kursi dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas diharapkan siswa-siswi dapat lebih bisa memahami dengan seksama pelajaran yang diajarkan.

Kendala yang dihadapi oleh Program Pendidikan Non-Formal yang diwadahi Sanggar Kegiatan Belajar dalam Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana sudah cukup memadai hanya saja beberapa hal belum terpenuhi seperti komputer, untuk pemenuhan tersebut harus menunggu cukup lama karena dana yang dibutuhkan harus melewati keputusan Pemerintah Daerah, sedangkan pada saat sekarang ini dana lebih difokuskan ke kesehatan karena wabah covid-19. Pemerintah Daerah dengan sanggar kegiatan belajar harus melakukan komunikasi lagi mengenai masih adanya kekurangan sarana dan prasarana sanggar kegiatan belajar demi menunjang dan memudahkan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sanggar kegiatan belajar.

Siswa yang mengambil program pendidikan non-formal sebagian besar sudah merasa cukup dengan fasilitas yang disediakan di Sanggar Kegiatan Belajar. Mereka menganggap sanggar kegiatan belajar sudah mirip seperti sekolah mereka terdahulu sebelum masuk sanggar kegiatan belajar. Jadwal yang ada juga sama seperti sekolah pada umumnya. Dan gedungnya juga sama seperti sekolah pada umumnya walaupun awalnya mereka tidak memiliki gedung untuk belajar tapi alhamdulillah sekarang mereka telah memiliki gedung yang cukup memadai untuk mereka pakai dalam belajar. Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang cukup memadai diharapkan siswa-siswi dapat lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru.

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Program Pendidikan Non-Formal yang diwadahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar seperti kita ketahui siswa dan siswi yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar rata-rata itu anak yang putus sekolah karena kenakalannya ada juga yang karena perekonomian orangtua mereka harus terpaksa berhenti sekolah dan bekerja. Memang benar antusias anak-anak di Sanggar Kegiatan Belajar sangat kurang karena mereka lebih memikirkan bagaimana cara menghasilkan duit dibanding untuk belajar.

Antusias anak-anak dalam hal belajar sangat kurang maka dari itu dibutuhkan cara lain untuk mengajari siswa agar antusias dalam belajar dan tenaga pengajar harus lebih ekstra dalam mengajar siswa agar mau belajar. Makanya dari itu guru harus lebih aktif dalam mengajari siswa dan siswi di Sanggar Kegiatan Belajar agar mereka dapat mengerti dan paham terhadap materi yang diajarkan. Dalam memajukan Program Pendidikan Non Formal salah satu usaha pemerintah adalah memasukan Program ini ke Satuan Pendidikan agar pemerintah pusat bisa fokus dalam memajukan program ini, karena jika program ini masih menjadi UPTD itu hanya menjadi wewenang daerah dalam memajukan nya tetapi kalau sudah di jadikan Satuan Pendidikan Pemerintah Pusat dapat membantu dalam segi sarana dan prasarana.

Materi yang dijelaskan oleh guru-guru di Sanggar Kegiatan Belajar sudah baik, tetapi memang butuh kesabaran yang lebih dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswa yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar karena mereka rata-rata memiliki latar belakang yang kurang baik disekolah mereka sebelumnya. Siswa dan siswi di Sanggar Kegiatan Belajar juga selalu bertanya kepada guru jika ada yang mereka tidak mengerti mengenai materi yang disampaikan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang memiliki peraturan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Perwako Pemerintah Daerah. Program Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang adalah Satuan dari Pendidikan Formal. Tetapi program yang berjalan sampai saat ini adalah PAUD, Program Paket A,B,C, Keterampilan (sewaktu-waktu dikarenakan covid19) dan Desain Grafis. Sanggar kegiatan Belajar pada saat ini sudah sangat maju baik dari segi fasilitas dan mutu sekolah dari sebelumnya saat masih menjadi unit pelaksana teknis dinas, sekarang Sanggar Kegiatan Belajar sudah layaknya seperti sekolah pada umumnya. Dahulunya keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar sangat di minati masyarakat tetapi semenjak covid-19 program tersebut hanya sesekali saja diadakan misalnya disaat hari-hari besar di Kota Padang Panjang.

Program Pendidikan Non Formal memiliki Struktur dari awal terbentuknya program sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing pegawai, tetapi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun struktur pasti mengalami perubahan dari segi perubahan orang nya dan tupoksi kerjanya. Sanggar Kegiatan Belajar menyesuaikan pekerjaan masing-masing pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan. Program Pendidikan Non-Formal sudah memiliki peraturan yang sudah disesuaikan dengan Dinas Pendidikan sehingga program ini tinggal dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dengan adanya struktur dan organisasi segala kegiatan menjadi tertata rapi.

Tantangan Pendidikan Non-Formal di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang

Tantangan yang di hadapi oleh Program Pendidikan Non-Formal yang diwadahi oleh Sanggar Kegiatan Belajar beberapa tahun yang lalu, kendala utama yang dihadapi adalah fasilitas gedung yang tidak memadai dan daya tampung nya kecil sehingga hanya sedikit siswa yang bisa diterima. Sedangkan gedung yang lama dijadikan tempat untuk PAUD saja selebihnya di tempat baru. Dalam hal ini pemerintah sangat membantu program ini sehingga memiliki gedung yang lebih luas untuk menampung siswa yang lebih banyak. Tidak itu saja Sanggar Kegiatan Belajar juga sekarang sudah memiliki taman bacaan, bengkel, toilet, penambahan 2 kelas belajar. Biasanya masyarakat juga ikut belajar mengenai kerajinan dengan mengundang narasumber untuk melakukan sosialisasi kerajinan di Sanggar Kegiatan Belajar, tetapi dikarenakan covid-19 anggaran untuk kegiatan tersebut lebih di fokuskan untuk program paket A,B dan C. [Susanto, Y., & Marnisah, L. \(2021\)](#) menyatakan bahwa perlunya pengawasan atau pengendalian yang bersifat menyeluruh untuk semua aktivitas yang dijalankan oleh sebuah organisasi.

Tantangan yang dihadapi masih kurangnya sosialisasi program pendidikan non-formal baik kepada masyarakat ataupun kepada anak-anak yang putus sekolah. Sehingga dengan sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai program tersebut tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah tidak melanjutkan sekolah kembali mereka lebih memilih untuk bekerja. Pengenalan mengenai program ini sangat diharapkan agar anak-anak yang putus sekolah masih bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Program Pendidikan Non-Formal di Kota Padang Panjang selalu ingin melakukan perubahan setiap tahunnya tetapi karena kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan non formal banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan mengerti program tersebut. Hanya segelintir orang yang mengerti dan paham akan program ini dan ikut bergabung dalam sanggar kegiatan belajar.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Pendidikan Non Formal pada Satuan Pendidikan Non Formal di Kota Padang Panjang, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang terdiri dari beberapa komponen yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam [Putra, R. H., & Khaidir, A. \(2019\)](#) pada tahun 2010. Program ini telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perubahan yang terjadi setelah sanggar kegiatan pembelajaran dijadikan Satuan Pendidikan, seperti perubahan dalam hal sarana dan prasarana yang lebih baik dan perubahan dalam hal pendidikan yang lebih baik, hanya dari segi sumber daya manusia yang lebih baik. masih belum optimal.

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan ([Mufahamah, E. 2020](#)).

Tantangan yang dihadapi oleh Program ini adalah dalam hal Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana sudah cukup memadai hanya saja beberapa hal belum terpenuhi seperti komputer dan prasarana lain. Untuk pemenuhan fasilitas tersebut harus menunggu cukup lama karena dana yang dibutuhkan harus melewati keputusan Pemerintah Daerah, sedangkan pada saat sekarang ini dana lebih difokuskan ke kesehatan karena wabah covid-19.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Adanya penelitian ini mampu bermanfaat selaku bahan masukan dan perbaikan untuk pihak yang berwenang dan terkait dalam hal ini untuk menangani fakir miskin di Indonesia. Bermanfaat dalam memperkaya referensi kepustakaan dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dan mampu berperan sebagai rujukan untuk peneliti mendatang yang hendak mengangkat pembahasan serupa. Fokus dari perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu kegiatan serta kejadian yang muncul sesudah pengesahan pedoman kebijaksanaan Negara yang meliputi upaya dalam mengadministrasikannya ataupun untuk menyebabkan dampak/akibat nyata terhadap kejadian maupun masyarakat, Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Pendidikan Non-Formal Pada Satuan Pendidikan Non-Formal Kota Padang Panjang, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang terdiri beberapa komponen dikemukakan oleh George C. Edward III tahun 2010.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis serta pihak Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang serta pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi tentang Implementasi Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, dan seluruh informan yang telah membantu penulis dalam berbagai aspek demi keberlangsungan penelitian ini.

References

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cakranegara, P. A. (2020). Manajemen perubahan perguruan tinggi pada saat pandemi Covid-19. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 1(1), 57-69.
- Fitrianingrum, N. S., Aminin, S., & Riyanto, R. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru SMA di Kecamatan Purbolinggo. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 71-83.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Indraningrum, P. (2015). Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul Melalui Model Kemitraan. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 4(3).
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Edisi ke-2)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kaplan, Abraham. (2014). *Power and Society*. Yale University Press, New Haven
- Lajas, R., & Macário, R. (2020). Public policy framework supporting “mobility-as-a-service” implementation. *Research in Transportation Economics*, 83, 100905. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100905>
- Maulina, v. (2020). Analisis implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah (studi pada kabupaten agam dan kota padang panjang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
- Moeloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Mufahamah, E. (2020). Mengidentifikasi kinerja manajerial dalam meningkatkan nilai rumah sakit tipe d di Provinsi Lampung. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 1(1), 13-31.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Walikota (PERWALI). 2017. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang *Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggaranggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga*. Kota Padang Panjang: Peraturan Walikota Padang Panjang
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations no. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 15(1), 236-242.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Susanto, Y., & Marnisah, L. (2021). Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi bagi Pengawas Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 101-108.
- Soerodjo, R. E. D. M. P. (2020). Manajemen dalam Akreditasi di Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Malang. *J+ PLUS UNESA*, 9(1).
- Trisnawati, E., Iskandar, I., & Gamar, M. M. (2020). Upaya Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Mapande Terhadap Siswa Putus Sekolah Di Desa Toaya Vunta Kecamatan Sindue. *Nosarara: Jurnal Pendidikan dan ilmu Sosial*, 7(1).
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.